

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum pengurus, yang berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya demokrasi. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai demokrasi pada tingkat daerah yang kerap dikenal dengan sebutan pemilihan kepala daerah. Setelah reformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan dua mekanisme, yakni baik secara langsung maupun perwakilan. Pemilihan kepala daerah secara langsung berimplikasi pada adanya sengketa hasil atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah khususnya pada era reformasi dan perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, agar dapat melihat perkembangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari berbagai aspek hukum yang berlaku. Selain itu spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, agar dapat mendeskripsikan dengan rinci bagaimana perkembangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang menghasilkan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia kerap mengalami perubahan yang menimbulkan implikasi pada mekanisme pelaksanaan serta proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses yang kompleks. Hal tersebut menciptakan polemik bagi lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Polemik tersebut kemudian menghantarkan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena kompleksnya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka dibutuhkan regulasi yang secara rigid mengatur mengenai kewenangan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: *Perkembangan Kewenangan, Perselisihan Hasil, Pemilihan Kepala Daerah.*

ABSTRACT

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a country based on law. The concept of a rule of law adopted by Indonesia is a rule of law state, which has implications for fulfilling people's welfare. One form of fulfilling the welfare of society is the existence of democracy. In this study, we will discuss democracy at the regional level which is often known as regional head elections. After the reform, regional head elections in Indonesia can be carried out with two mechanisms, namely either directly or through representation. Regional head elections directly have implications for disputes over the results or objections to the results of regional head elections. Therefore, this study will discuss the arrangements regarding regional head elections, especially in the reform era and the development of the era of settlement of regional head election results.

This research approach was carried out using a normative juridical method, in order to be able to see the development of the settlement of regional head election results equality from various aspects of applicable law. In addition, the specification of this study uses a descriptive method, in order to be able to describe in detail how the results of regional head elections in Indonesia are developing. Meanwhile, the data used in this study were obtained through a literature study which produced secondary data and was analyzed qualitatively.

Based on the research results, the implementation of regional head elections in Indonesia is guided by the applicable laws and regulations. In its development, regulations regarding the election of regional heads in Indonesia often experience changes which give rise to the implementation mechanism as well as the settlement process for the results of regional head elections. Settlement of the results of regional head elections is a complex process. This created a polemic for the institution that resolved it in resolving the issue of regional head election results. The polemic then handed over authority to the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Special Judicial Body as institutions for applying regional head election results. Due to the complexity of the process of settling the results of regional head elections, regulations are needed that strictly regulate the right to settle the results of regional head elections..

Keyword: Development of Authority, Results Dispute, Election of Regional Heads